

# Politik Pengakuan

(PK, 16 April 2010)

Otto Gusti\*

Pertengahan Maret 2010 lalu pimpinan jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rock cabang Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, mengajukan pengaduan kepada Forum Kepedulian Sosial di Maumere. Alasannya, kelompok GBI Rock merasa hak-hak asasi dan konstitusionalnya untuk beribadat telah dilecehkan. Padahal hak-hak ini dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 pasal 29, ayat 1 dan 2.

Izinan untuk mendirikan rumah ibadat terkesan dipersulit oleh pemerintah setempat dengan alasan kelengkapan administratif yang belum beres. Juga kegiatan ibadat yang dijalankan di rumah pemimpin jemaat mendapat protes dari warga dengan alasan kegiatan tersebut tidak mendapat izin ketua RW (Rukun Warga) dan lurah. Akan tetapi di sisi lain, kelompok mayoritas (Katolik) juga sering menjalankan ibadat di rumah-rumah pribadi tanpa harus meminta izin dari lurah atau RW.

Intoleransi masih merupakan persoalan krusial di negeri ini. Sikap intoleran bukan monopoli agama atau kelompok etnis tertentu. Pelecehan atas hak-hak dasar seperti kebebasan beragama sering dialami kelompok minoritas. Sementara kaum mayoritas umumnya sangat rentan untuk bersikap intoleran.

Bahkan di negara-negara dengan tradisi demokrasi sangat tua dominasi budaya mayoritas atas kelompok minoritas masih sering terjadi. Semacam terdapat anggapan umum bahwa budaya mayoritas merupakan tolok ukur hidup bersama satu-satunya.

Di *Gelsenkirchen*, Jerman misalnya, pada tanggal 27 Maret 2010, massa Partai Kanan Radikal Jerman (Pro NRW) berdemonstrasi menentang pendirian mesjid di seluruh Eropa. Gerakan radikal ini mengusung tema „*Abendland in Christenhand*“ – „Eropa di Tangan Orang Kristen“. Atas nama kekristen mereka berperang melawan hegemoni budaya Islam. Islam dianggap membahayakan kelangsungan hidup budaya Kristen di Eropa.

Gerakan Partai Radial Kanan ini mendapat kecaman keras dari pimpinan gereja di Jerman, baik gereja Katolik maupun gereja Protestan. Mereka dikritik telah menggunakan Kekristenan untuk merealisasikan ideologi politiknya yang fasis.

## Multikulturalisme

Perjuangkan kaum minoritas seperti kelompok emigran, kelompok religius tertindas, kaum perempuan, *gay* dan kaum lesbian agar hak-haknya diakui setara dengan budaya mayoritas melahirkan gerakan multikulturalisme.

Dalam ranah filsafat politik diskursus seputar multikulturalisme menjadi ramai ketika *Charles Taylor*, filsuf sosial kontemporer asal Kanada, pada tahun 1993 menerbitkan karyanya berjudul *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Karya ini dapat dilihat sebagai titik awal perdebatan seputar multikulturalisme dan mendapat tanggapan dari beberapa pemikir sosial terkemuka abad ini seperti Juergen Habermas, Amy Gutmann dan Michael Walzer.

Salah satu latar belakang historis penulisan buku ini ialah perjuangan kaum minoritas di Amerika Serikat yakni orang-orang Indian, kelompok kulit hitam, kaum feminis, kelompok *gay* dan lesbian. Kelompok ini merasa bahwa nilai-nilai budaya mereka tidak cukup terwakili dalam kurikulum pendidikan dan mayoritas kebudayaan Amerika yang maskulin, heteroseksual, kulit putih dan beragama Kristen.

Konsep multikulturalisme bertolak dari pengandaian antropologis bahwa komunitas budaya minoritas terutama kaum perempuan dan kelompok homoseksual hanya dapat mengaktualisasikan identitas dan jati dirinya secara wajar jika nilai-nilai budaya mereka diterima dan diakui sebagai bagian dari kebudayaan bersama. Ini sebuah tuntutan akan perlakuan yang *egaliter* terhadap semua elemen budaya dalam sebuah masyarakat multikultural.

Multikulturalisme merupakan reaksi kritis atas liberalisme dengan penekanan pada hak-hak kebebasan individual. Akibatnya terjadi pengabaian hak-hak kolektif terutama hak-hak khusus kelompok minoritas. Kaum multikulturalis menolak konsep antropologis liberal "*encumbered self*". Dalam kaca mata liberalisme jati diri manusia moderen bersifat atomistis terlepas dari identitas budaya, agama, etnis dan kelas sosial. Sementara dalam pandangan multikulturalisme jati diri manusia hanya mungkin berkembang dalam identitas kolektif yang harus mendapat pengakuan.

### **Pengakuan**

Subjek multikultural hanya mungkin berkembang menuju pemenuhan jati dirinya jika ditopang dengan pilar-pilar intersubjektif seperti pengakuan, respek dan penghormatan dari orang lain. Ada sebuah korelasi substansial antara pengakuan dan identitas diri.

Seorang warga Gereja Bethel dapat mengembangkan identitas religiusnya jika ia tidak dihalangi-halangi dalam mempraktikkan imannya dan mendapat pengakuan dari yang lain. Demikianpun kelompok homoseksual atau lesbian hanya dapat menghayati kepenuhan identitas kemanusiaannya jika mereka diberi tempat berekspresi dalam masyarakat.

Maka, pembatalan konferensi kaum *gay* dan lesbian yang menurut rencana diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 26-28 Maret lalu merupakan kegagalan membangun politik pengakuan di Indonesia. Seharusnya dalam sebuah masyarakat multikultural, negara harus melindungi setiap kelompok budaya dan agama dari intervensi kekerasan kelompok lain.

Pelecehan terhadap kekhasan individual dan kultural seseorang (sebagai orang hitam, homoseksual atau orang cacat) merupakan instrumen represi paling kuat dari budaya mayoritas. Pelecehan menyebabkan subjek bersangkutan menginternalisasi perasaan rendah diri serta mengungkapkannya kembali lewat perilakunya yang patologis.

Seorang manusia atau sekelompok orang akan menderita deformasi jika lingkungan sekitar menciptakan gambaran yang mengekang atau menghina tentang diri atau kelompoknya. Tidak adanya pengakuan dapat menyebabkan penderitaan atau penindasan yang membawa orang lain kepada cara berada yang palsu dan menghancurkan.

Pengakuan bukan merupakan sesuatu yang aksidental, tapi substansial dalam pembentukan jati diri manusia. Atau dalam ungkapan Taylor sendiri, "pengakuan bukan sekedar ungkapan sopan santun terhadap sesama. Lebih dari itu, tuntutan akan pengakuan merupakan kebutuhan dasar manusia".

Namun penekanan berlebihan kaum multikulturalis pada aspek otentisitas diri dan keunikan masing-masing budaya dapat mempersulit membangun hidup bersama dan dialog dalam rangka sebuah negara bangsa. Perjuangan masyarakat *Quebeck* misalnya untuk memisahkan diri dari Kanada demi menjaga kelangsungan hidup kebudayaan dan bahasa Prancis dapat dipandang positif sejauh kebudayaan dimengerti secara sempit sebagai kelompok bahasa. Namun dalam pemahaman tentang kebudayaan lebih luas yang mencakupi agama misalnya, perjuangan multikulturalisme dapat bermuara pada pembentukan negara agama.

Maka politik pengakuan masih harus dilengkapi dengan politik martabat manusia (*Politik der Wuerde*) atas dasar hak-hak kebebasan individual. Benar bahwa jati diri manusia tak dapat

dipisahkan dari identitas kolektif, namun identitas kolektif tak pernah boleh melegitimasi penindasan atas individu-individu.

Otto Gusti, *Dosen Etika Sosial di STFK Ledalero, Maumere*